PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

SAHABAT PUSKA (SATU HARAPAN BACA TERINTEGRASI PERPUSTAKAAN MIMIKA)

1.2 Tahapan Inovasi

inisiatif

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

asn

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Perpustakaan

1.8 Waktu Uji Coba

2026-01-15

1.9 Waktu Penerapan

2026-06-01

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

- DASAR HUKUM
- PERMASALAHAN

  Perpustakaan baik umum maupun perpustakaan sekolah banyak mengalami perpmaslahan. permasalahan utama adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya buku-buku yang tersedia di perpustakaan. bahkan ada juga Kampung dan sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. di sekolah jika ada perpustakaan sering seklai berubah fungsi menjadi gedung kelas maupun gedung kantor dan lain sebagainya. di sekolah-sekolah kadang koleksi buku hanya berupa buku teks pelajaran sehingga siswa malas ke perpustakaan. Tidak adanya pengelola tetap bagi perpustakaan-perpustakaan tersebut juga menjadi masalah karena perpustakaan tidak terkelola dengan baik.

  kondisi diatas berpengaruh terhadap indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca masyarakat. secara nasional hasil IPLM dan TKM Kabupaten Mimika masih rendah.

  A. PERMASALAHAN MAKRO

  Secara makro, ketiadaan perpustakaan—baik di sekolah maupun di kampung—adalah tanda bahwa **pengetahuan belum dianggap sebagai komoditas yang berharga** dalam struktur sosial masyarakat kita. Berikut adalah analisis makro mengapa fenomena ini terjadi secara sistemik:

  1. Marginalisasi Literasi dalam Prioritas Pembangunan

  Secara makro, pembangunan kita masih sangat **"fisik-sentris"** (jalan, jembatan, gedung) dan **"ekonomi-sentris"** (pasar, proyek komoditas).

- **Perpustakaan Tidak Menghasilkan "Laba Instan":** Baik di tingkat sekolah maupun kampung, keberhasilan diukur dari apa yang terlihat. Perpustakaan adalah investasi jangka panjang yang

hasilnya baru terasa satu generasi kemudian. Karena tidak ada dampak elektoral atau ekonomi yang instan, perpustakaan menjadi sektor yang paling akhir dipikirkan dalam anggaran.

- **Budaya "Buta Informasi":** Ada anggapan makro bahwa "yang penting kenyang dan ada uang", sehingga kebutuhan akan informasi, refleksi, dan wawasan (yang disediakan buku) dianggap sebagai kebutuhan tersier atau "kemewahan".

2. Krisis Pengakuan terhadap "Tenaga Penggerak"

Permasalahan ketiadaan pengelola tetap adalah cerminan dari **tidak adanya jenjang karier bagi penjaga pengetahuan.**

- **Pustakawan Dianggap "Penjaga Gudang":** Di tingkat makro, negara belum memposisikan pustakawan sebagai "arsitek peradaban" atau "fasilitator belajar". Akibatnya, tidak ada standar penggajian yang layak, tidak ada status kepegawaian yang pasti, dan tidak ada apresiasi profesi.
- **Ketiadaan Insentif Sosial:** Di kampung, mereka yang mau menggerakkan literasi seringkali bergerak sendirian (pejuang tunggal) tanpa dukungan sistem. Tanpa pengakuan profesi dan dukungan finansial, mustahil mengharapkan adanya pengelola tetap yang berdedikasi tinggi.

3. Ketimpangan Distribusi Pengetahuan (Digital & Fisik)

Secara makro, terjadi **"apartheid pengetahuan"** antara pusat dan daerah.

- **Sentralisasi Koleksi:** Buku-buku berkualitas cenderung menumpuk di pusat-pusat kota atau di tangan kelas menengah atas. Distribusi buku ke pelosok (seperti di daerah Anda) seringkali terhambat oleh logistik yang mahal dan tidak adanya "jalur distribusi pengetahuan" yang terintegrasi.
- **Kesenjangan Kualitas:** Buku yang sampai ke kampung atau sekolah pelosok seringkali adalah "sisa" atau buku yang tidak laku, yang justru semakin menjauhkan masyarakat dari minat baca karena isinya tidak relevan dengan realitas hidup mereka.

4. "Budaya Lisan" yang Belum Terjamah Literasi

Secara sosiologis, masyarakat kita di tingkat akar rumput (kampung) dan lingkungan sekolah masih terjebak dalam budaya lisan yang dominan.

- **Literasi sebagai "Benda Asing":** Perpustakaan seringkali dianggap sebagai "karya luar" yang tidak menyatu dengan budaya lokal. Karena buku-buku yang ada tidak mencerminkan kearifan lokal atau kebutuhan praktis masyarakat, perpustakaan terasa seperti benda asing yang dipaksakan masuk ke lingkungan yang tidak memerlukannya.
- **Absennya "Teladan Literasi":** Di tingkat makro, figur-figur publik atau pemimpin daerah jarang menunjukkan bahwa mereka adalah pembaca yang setia. Ketika pemimpin tidak membaca, masyarakat menganggap membaca tidak penting untuk menjadi sukses.

b. PERMASALAHAN MIKRO

Berikut adalah identifikasi permasalahan mikro yang membuat sekolah dan kampung menjadi "padang gurun literasi":

1. Masalah Mikro di Sekolah: "Formalitas yang Membunuh Semangat"

Di sekolah, akar masalah mikronya adalah **literasi sebagai beban administratif, bukan kebutuhan pendidikan**.

- **Penyalahgunaan Fungsi Ruang:** Karena sekolah tidak memandang literasi sebagai hal penting, ruangan yang seharusnya jadi "Jantung Pengetahuan" (perpustakaan) dikorbankan demi kebutuhan fisik lainnya (ruang kelas/gudang). Ini adalah pernyataan sikap sekolah bahwa "belajar adalah tentang menghafal di kelas, bukan menjelajah di perpustakaan."

- **Ketiadaan Kurator (The Missing Curator):** Pustakawan di sekolah sering kali adalah "pilihan terakhir". Jika guru tidak punya jam mengajar, dia diberi tugas menjaga perpustakaan. Akibatnya, perpustakaan tidak memiliki **kurator**—yaitu sosok yang tahu buku apa yang harus disodorkan kepada anak yang sedang sedih, atau anak yang sedang penasaran tentang luar angkasa. Tanpa kurator, perpustakaan hanyalah tumpukan kertas.
- **Kurikulum yang "Anti-Membaca":** Guru lebih mengejar target nilai ujian daripada mengajarkan metode riset. Karena tidak ada kewajiban untuk riset atau membaca buku tambahan di kurikulum harian, perpustakaan menjadi tempat yang tidak relevan dengan kebutuhan murid untuk "mendapatkan nilai".

2. Masalah Mikro di Kampung: "Mentalitas Pragmatis & Mitos Waktu"

Di tingkat kampung, permasalahan mikronya berakar pada **keseharian yang menuntut hasil instan**.

- **"Membaca Tidak Mengenyangkan":** Masyarakat kampung sering terjebak dalam mentalitas pragmatis. Karena buku dianggap tidak memberikan hasil ekonomi instan (seperti bertani atau berdagang), literasi dianggap sebagai aktivitas orang yang "tidak punya kerjaan". Ini adalah **masalah mikro dalam sistem nilai keluarga**.
- **Tidak Ada "Ruang Ketiga" (Third Space):** Kampung kekurangan "ruang ketiga"—tempat antara rumah dan tempat kerja yang aman untuk berkumpul dan bertukar ide. Jika ada perpustakaan di kampung, ia seringkali kaku dan tidak mengundang. Tidak ada suasana yang hangat untuk sekadar duduk sambil membaca.
- **Ketidakmampuan Mengakses "Bahasa Buku":** Banyak koleksi buku yang masuk ke kampung tidak dibaca bukan karena orangnya tidak mau, tapi karena bahasanya terlalu berat atau topiknya terlalu jauh dari kehidupan mereka. Tidak ada jembatan bahasa antara isi buku dengan realitas kehidupan warga.

3. Benang Merah Mikro: "Siapa Penjaganya?"

Di sekolah maupun di kampung, masalah mikro yang paling menyakitkan adalah **status pengelola yang tidak menentu**.

- **"Relawan yang Kelelahan":** Pengelola perpustakaan (baik di sekolah atau kampung) seringkali bekerja dengan semangat di bulan pertama, lalu kelelahan karena tidak ada sistem dukungan (honor, jenjang karier, atau apresiasi). Ketika mereka berhenti, perpustakaan mati.
- **Stigma "Penunggu Barang":** Karena tidak ada kejelasan status pekerjaan, pengelola dianggap hanya "penjaga barang". Mereka tidak diberi peran untuk menggerakkan komunitas. Jika Anda seorang pengelola yang dianggap hanya sebagai "penjaga barang", tentu Anda tidak akan punya motivasi untuk mengundang orang datang.

3. ISU STRATEGIS

1. ISU GLOBAL

   Dalam kacamata global, isu ini disebut sebagai **"The Literacy-Development Paradox" (Paradoks Literasi dan Pembangunan)**. Berikut adalah pembedahan isu global dalam memandang ketiadaan perpustakaan dan buku:

   1. "Human Capital Flight" (Pelarian Modal Manusia)

   Secara global, ekonomi masa kini tidak lagi berbasis pada komoditas fisik (seperti tambang atau sawit), melainkan pada **ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge Economy*)**.

   Isu Global: Negara-negara yang mengabaikan literasi di tingkat dasar (sekolah/kampung) sedang melakukan **bunuh diri ekonomi secara perlahan**. Ketika anak-anak tidak dibiasakan membaca dan meneliti, mereka tidak akan siap berkompetisi di pasar tenaga kerja global yang serba otomatis dan digital.

Dampak: Sekolah yang tidak punya perpustakaan di Timika hari ini sedang menciptakan "pengangguran struktural" 10-15 tahun ke depan, yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi dan arus informasi dunia.

2. "The Digital Divide" (Kesenjangan Digital)

Dunia sekarang memandang literasi bukan lagi sekadar *bisa membaca huruf*, tapi ***bisa mengakses dan memverifikasi informasi***.

Isu Global: Ketiadaan buku dan perpustakaan di sekolah/kampung memicu *Digital Divide*. Jika mereka tidak punya buku sebagai fondasi berpikir, saat mereka memegang *smartphone*, mereka tidak memiliki "filter" untuk membedakan fakta, hoaks, atau disinformasi.

Bahaya Global: Dalam skala global, masyarakat yang buta literasi di tingkat dasar akan menjadi "sasaran empuk" dari radikalisasi, manipulasi politik, dan penipuan digital karena mereka tidak memiliki fondasi berpikir kritis yang dibentuk oleh buku.

3. "Democratic Deficit" (Defisit Demokrasi)

Ada konsensus global bahwa **literasi adalah oksigen demokrasi**.

Isu Global: Perpustakaan (baik di kampung atau sekolah) secara global diakui sebagai "Ruang Ketiga" (*Third Space*)—ruang di mana warga bisa bertukar ide secara bebas dan setara.

Analisis: Ketika perpustakaan tidak ada, warga kehilangan tempat untuk belajar menjadi warga negara yang kritis. Masyarakat yang tidak membaca adalah masyarakat yang "tuli" terhadap kebijakan publik dan cenderung hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, bukan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan.

4. "Sustainable Development Goals (SDGs)"

PBB melalui UNESCO menekankan bahwa literasi adalah hak asasi manusia.

Isu Global: Ketidakberdayaan Anda di lapangan adalah potret nyata kegagalan dalam mencapai *SDG 4 (Quality Education)*. Dunia internasional sudah lama menggeser fokus dari "sekolah sebanyak mungkin" ke "kualitas belajar sebaik mungkin".

Koneksi: Jika sekolah di Timika tidak punya perpustakaan, itu artinya kita sedang melanggar komitmen global untuk memberikan pendidikan berkualitas yang memerdekakan.

5. "Information Poverty" sebagai Penjajahan Baru

Secara global, para pengamat menyebut kondisi ini sebagai **"Information Poverty" (Kemiskinan Informasi)**.

Isu Global: Di dunia yang informasinya sangat melimpah (*Information Overload*), orang yang tidak punya akses ke perpustakaan/buku justru menjadi "yang paling miskin". Mereka memiliki akses ke media sosial (yang isinya sampah informasi), tapi tidak punya akses ke sumber pengetahuan yang terstruktur (buku/literatur ilmiah).

Paradoks: Kita hidup di era di mana informasi ada di genggaman, tapi anak-anak di kampung/sekolah Anda justru "lapar" karena tidak diajarkan cara mengolah informasi tersebut.

2. ISU NASIONAL

Jika kita memotret permasalahan ini dari **perspektif nasional Indonesia**, kita tidak hanya melihat kekurangan fasilitas, tetapi kita sedang menyaksikan **"Paradoks Literasi Nasional"**.

Indonesia berada dalam situasi di mana kita terus menggaungkan "Indonesia Emas 2045", namun fondasi dasarnya—yakni ekosistem literasi di sekolah dan kampung—masih sangat rapuh. Berikut adalah identifikasi isu nasional yang melatarbelakangi masalah yang Anda temukan di lapangan:

1. "Pendidikan Berbasis Angka" vs "Literasi Berbasis Kognisi"

Di tingkat nasional, narasi pendidikan kita sangat dominan pada **Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan**.

Isu Nasional: Sekolah sering kali panik dengan nilai *Literasi dan Numerasi* yang rendah. Namun, alih-alih memperbaiki "jantung" (perpustakaan), mereka justru melakukan "bimbel kilat" atau "drilling" soal.

Masalahnya: Pemerintah pusat mendorong literasi, namun di lapangan, literasi hanya dipandang sebagai **alat untuk memperbaiki skor ujian**, bukan sebagai kebiasaan berpikir. Inilah alasan kenapa perpustakaan sekolah sering terbengkalai; mereka tidak melihat perpustakaan sebagai "tempat belajar", melainkan hanya sebagai "perpustakaan buku teks" yang tidak menambah skor ujian.

2. Efektivitas Dana BOS yang Tidak "Literasi-Sentris"

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang ada, tetapi secara nasional, penggunaannya sangat ditentukan oleh prioritas kepala sekolah.

Isu Nasional: Tidak ada *mandatory spending* (kewajiban belanja) yang cukup kuat secara nasional untuk mewajibkan sekolah merawat perpustakaan dan koleksi buku.

Dampaknya: Anggaran sekolah cenderung tersedot ke pemeliharaan fisik bangunan atau operasional rutin yang terlihat mata. Perpustakaan menjadi "korban" karena tidak ada sanksi nasional yang tegas bagi sekolah yang membiarkan perpustakaannya mati.

3. "Digitalisasi" yang Terburu-buru tanpa Literasi Dasar

Gerakan nasional menuju *Digitalisasi Sekolah* (seperti pengadaan Chromebook atau akses internet) seringkali melompati tahap literasi dasar.

Isu Nasional: Ada asumsi bahwa "jika sekolah sudah ada internet, berarti sudah literat". Padahal, banyak sekolah di daerah (termasuk di daerah Anda) yang koneksinya buruk atau gurunya belum siap memanfaatkan perangkat tersebut.

Paradoks Nasional: Kita sibuk membangun "atap" (digitalisasi), tapi "fondasi" (buku cetak dan budaya baca) belum matang. Akibatnya, perpustakaan fisik dianggap "kuno" dan ditinggalkan, padahal buku fisik tetaplah instrumen literasi terbaik untuk membangun nalar kritis anak di usia sekolah.

4. Krisis Status Pustakawan Sekolah (Nasib Fungsional)

Secara nasional, nasib pustakawan di sekolah-sekolah sangat memprihatinkan.

Isu Nasional: Posisi pustakawan sekolah jarang masuk dalam formasi guru yang diprioritaskan. Banyak yang akhirnya hanya tenaga honorer atau guru kelas yang "di-staf-kan" di perpustakaan.

Masalah Mikro-Nasional: Selama tidak ada regulasi nasional yang memberikan kesejahteraan dan jenjang karier yang jelas bagi pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan tidak akan pernah memiliki "penjaga" yang kompeten. Ini adalah masalah struktural yang membuat perpustakaan sekolah tidak mungkin bertahan lama.

5. Urban-Centric Literacy Development

Pusat pengembangan literasi nasional masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Isu Nasional: Program-program bantuan buku, pelatihan, dan advokasi literasi cenderung menumpuk di pusat-pusat kota besar. Daerah seperti Timika seringkali hanya mendapatkan "sisa" dari program nasional, atau bahkan tidak tersentuh sama sekali karena kendala logistik yang mahal.

Ketimpangan Akses: Distribusi buku nasional kita belum adil. Hal ini menyebabkan anak-anak di daerah pelosok tidak memiliki akses terhadap buku-buku baru yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

3. ISU LOKAL

Berikut adalah identifikasi isu lokal yang membuat literasi di Mimika menjadi tantangan yang sangat spesifik:

1. "Sindrom Kota Industri" (Pragmatisme Ekonomi)

Mimika memiliki karakteristik sebagai kota yang digerakkan oleh industri ekstraktif skala global.

Isu Lokal: Masyarakat cenderung sangat pragmatis. Fokus utama kehidupan adalah bekerja di sektor industri, logistik, atau perdagangan yang melayani ekosistem industri tersebut.

Dampak Literasi: Buku dan ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai hal yang "tidak langsung menghasilkan uang". Jika belajar tidak langsung berujung pada kesempatan kerja di perusahaan besar atau usaha yang menguntungkan, maka minat untuk mendalami literasi akan rendah.

2. Tantangan Geografis & Logistik (Ketimpangan Akses)

Mimika memiliki topografi yang sangat kontras, dari pesisir hingga pegunungan tinggi.

Isu Lokal: Distribusi logistik buku dan sarana perpustakaan ke sekolah-sekolah di wilayah pedalaman atau pesisir Mimika sangat mahal dan sulit.

Dampak Literasi: Buku-buku yang sampai ke sekolah-sekolah di pinggiran sering kali sudah tua, tidak relevan, atau rusak. Akibatnya, ada jurang lebar antara kualitas layanan literasi di pusat kota Timika dengan sekolah-sekolah di distrik yang jauh.

3. Fragmentasi Budaya (Multikulturalisme yang Belum Terintegrasi)

Mimika adalah miniatur Indonesia dengan keberagaman suku yang luar biasa.

Isu Lokal: Koleksi buku di perpustakaan sering kali tidak merepresentasikan keberagaman budaya lokal Mimika maupun Papua secara umum. Seringkali buku yang tersedia adalah buku umum dari pusat (Jakarta) yang kurang "menyentuh" konteks budaya anak-anak Papua.

Dampak Literasi: Jika anak-anak tidak melihat cerita atau konteks mereka sendiri dalam buku, mereka akan merasa bahwa "membaca" adalah kegiatan milik orang lain (orang dari luar Papua), bukan milik mereka. Ini menciptakan jarak psikologis dengan kegiatan literasi.

4. METODE KEBAHARUAN

Menanggapi permasalahan diatas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika memandang bahwa masalah literasi adalah permaslahan bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Pihak Dinas berinisiatif untuk menggalang kerjasama dengan semua pihak agar bisa memberikan bantuan literasi bagi kampung-kampung da juga sekolah-sekolah yang membutuhkan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung perpsutakaan berupa buku, rak buku dan lain-lain.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai perpustakaan umum merupakan institusi bukan merupakan institusi yang membawahi pengembangan perpustakaan sekolah, namun sebagai institusi pembina seharusnya Dinas juga mampu memberikan insentif pengembangan. oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Mimika memandang perlu untuk mengajukan suatu rancangan peraturan bupati agar Dinas mampu melakukanintervensi lebih terhadap kebijakan perpustakaan di daerah.

selanjutnya dengan payung hukum yang jelas, Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana buku bagi

perpustakaan yang membutuhkan serta memberikan bantuan berupa pendampingan pengelolaan perpustakaan.

a. kondisi sebelum adanya inovasi

1. Jumlah buku secara total adalah

2. Jumlah perpustakaan sekolah secara total adalah

3. Jumlah perpustakaan kampung secara total adalah

4. Indeks IPLM adalah

5. Indeks TGM adalah

b. Kondisi setelah adanya inovasi

1. Jumlah buku secara total adalah

2. Jumlah perpustakaan sekolah secara total adalah

3. Jumlah perpustakaan kampung secara total adalah

4. Indeks IPLM adalah

5. Indeks TGM adalah

5. KEUNGGULAN KEBARUAN

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terjun langsung dalam pengelolaan perpustakaan baik di tingkat kampung maupun sekolah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana perpustakaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan

6. CARA KERJA INOVASI

1. PERSIAPAN AWAL

a. Penyusunan Peraturan Bupati Mimika tentang perpustakaan di Kabupaten Mimika

b. Kerja sama dengan sektor swasta untuk melakukan inovasi dengan menghimpun sarana dan prasarana yang dapat diberikan bagi perpustakaan.

c. pengumpulan sarana dan prasaran bantuan baik berupa buku, rak buku, maupun yang lain.

2. PEMBAGIAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

a. Sekolah/Kampung mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui google form

b. Tim Dinas Perpustakaan melakukan verifikasi apakah sekolah/kampung layak mendapat bantuan

c. Tim Dinas Perpustakaan mengirimkan bantuan kepada sekolah yang sudah terverifikasi.

d. Tim Dinas Perpustakaan memberikan pendampingan pengelolaan perpustakaan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Meningkatkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

1.13 Hasil Inovasi

1. Meningkatnya Jumlah agregat koleksi buku perpustakaan di Kabupaten Mimika

2. Meningkatnya Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung